

Press Release 24 Maret 2008

EKSPANSI MONETER DAN DESTIGMATISASI BI

Tim INDEF

Indonesia adalah negara anomali. Huru-hara ekonomi dunia tengah terjadi, para politisi justru sibuk berdagang sapi. Akibatnya, anomali pun melahirkan anomali. Salah satunya adalah depreasiasi rupiah.

Saat ini, mata uang nasional seharusnya menguat bila ditinjau dari kecenderungan penguatan nilai mata uang negara lain terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya.

Demikian pula, dari kaedah keseimbangan suku bunga antar negara, penurunan Fed rate dari 3.00 persen menjadi 2,25 persen (sementara BI rate bertahan pada angka 8 persen) menyebabkan meningkatnya paritas (perbedaan) suku bunga antara AS dan Indonesia. Hal ini membuat rupiah **undervalued**.

Mengikuti kaedah suku bunga di atas, pasar semestinya mengoreksi nilai rupiah ke atas terhadap US dollar. Akan tetapi, apa yang terjadi beberapa hari terakhir justru sebaliknya. Sehingga dari tinjauan ini, bisa disimpulkan bahwa depresiasi yang ada **BUKAN** diakibatkan terutama oleh **FAKTOR SUKU BUNGA**. Akan tetapi, anomali ini **LEBIH** disebabkan oleh adanya ekspektasi inflasi domestik yang lebih tinggi ketimbang negara lain termasuk AS, pada bulan-bulan mendatang.

Ekspektasi inflasi ini sendiri disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, potensi peningkatan defisit anggaran akibat belum tuntasnya *fine tuning* anggaran. Kedua, masih banyaknya gangguan sisi produksi dalam negeri baik karena faktor alam atau bukan, terutama di dua utama pertanian dan industri. Ketiga, kasus

suap BLBI yang melibatkan Bank Indonesia (BI) dan pemilihan gubernur baru pada lembaga tersebut yang sarat dengan intrik kelas tinggi.

Hal terakhir menarik untuk dielaborasi. Rupiah adalah satu *leading indicator* dari tingkat kepercayaan pemodal terhadap pengelolaan ekonomi nasional. Dimana penurunan kepercayaan akan meningkatkan nilainya, dan kenaikan kepercayaan akan mengakibatkan sebaliknya.

Dalam hal ini, berbagai intrik dan rekayasa hukum yang terjadi telah terbukti berpengaruh pada fokus BI mengendalikan inflasi inti, yang meningkat tajam pada dua bulan terakhir (Januari-Februari 2008). Inflasi tahun berjalan 2008 sebesar 2,44 persen merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Bahkan bila dibandingkan dengan tahun 2006 dimana terjadi kenaikan subsidi BBM yang hanya menghasilkan inflasi berjalan sebesar 1,95 persen sampai dengan Februari. Yang menyedihkannya lagi, kenaikan ini banyak dipengaruhi oleh komponen inflasi inti (30 persen), yang biasanya relatif terkendali berkat kehandalan BI.

Dari fenomena di atas, agaknya tidak terlalu salah bila dikatakan selain **HIGH OIL-PRICE EFFECT** terdapat juga **KPK-BURHANUDDIN EFFECT** sebagai penyebab meroketnya inflasi.

Dari uraian ini jelas bahwa suku bunga bukanlah faktor di balik peningkatan ekspektasi inflasi dan depresiasi rupiah. Untuk itu, BI rate seharusnya **TURUN**, setidaknya sama dengan penurunan **FED** rate sebesar 75 basis point menjadi **7,25** persen. Penurunan ini selain untuk meredam capital inflow berupa dana-dana jangka pendek, yang terbukti bisa bersifat sangat merusak. Juga untuk **MENSTIMULIR KONSUMSI DAN INVESTASI DOMESTIK** untuk mencegah terjadinya **RESESI** domestik.

Akan tetapi, pada saat yang sama, penurunan ini juga harus diimbangi dengan langkah-langkah antisipasi lain, terutama yang terkait dengan nilai rupiah. Kebijakan konvensional berupa intervensi pada pasar valuta asing harus dikurangi

dan dilakukan secara lebih selektif, mengingat hal ini sudah **TIDAK LAGI EFEKTIF**. Sebab gejolak yang ada lebih karena persoalan jangka panjang (produksi) dan kepercayaan. Dan bukan akibat dari persoalan jangka pendek ketidakseimbangan pasar uang.

Dalam hal ini, langkah yang bisa ditempuh oleh BI, selain intervensi selektif, adalah pembuatan peraturan percepatan konversi dollar yang dimiliki para eksportir, terutama dari BUMN. Cara lain adalah pemberian fasilitas pembelian dalam dollar oleh BI bagi BUMN, seperti misalnya pembelian minyak oleh PT Pertamina. Dengan fasilitas ini, mereka tidak perlu lagi masuk ke pasar valas yang menyebabkan tekanan terhadap rupiah.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah faktor psikologi pasar terhadap rupiah. Disini, peningkatan meningkatkan kredibilitas BI sebagai pengendali moneter adalah krusial. Untuk itu, **POLITISASI HUKUM** dan **STIGMATISASI BI** dalam kasus BLBI harus sejauh mungkin dihentikan. Bila politisasi ini terus berlanjut, dan hukum menjadi komoditas politik, sulit berharap ada perbaikan psikologis pasar yang pada gilirannya akan mempengaruhi nilai rupiah dan mengganggu stabilitas makro secara umum.

Bagi pemerintah, prioritas utama yang harus dibenahi saat ini adalah **KEBIJAKAN ANGGARAN**. Perubahan anggaran yang akan diajukan sebisa mungkin harus **REALISTIS**. Jangan lagi ada asumsi-asumsi tidak masuk akal untuk kemudian disiasati dengan tindakan-tindakan ad-hoc (i.e., Menambah Hutang) untuk menutup defisit. Pasar sudah cukup cermat dan bisa menebak langkah-langkah seperti ini. Sehingga yang terjadi sekedar peningkatan ketidakpercayaan.

Begitu juga, masih dari sisi kebijakan anggaran, pemerintah perlu **SEGERA** menguraikan secara **TEGAS** dan **SISTEMATIS** kebijakan apa yang akan ditempuh sebagai antisipasi kenaikan harga minyak. Pemerintah jangan lagi semata berwacana dan membuat pernyataan-pernyataan politis yang secara ekonomi tidak rasional tentang kebijakan **SUBSIDI**.

Prioritas lain adalah pengambilan langkah-langkah rasional dan tegas pada sisi produksi dan distribusi, yang merupakan penyebab lain dari peningkatan inflasi. Pembuatan peraturan-peraturan yang terkesan **PANIK** dan **KONTRAPRODUKTIF**, seperti peningkatan pajak ekspor atas CPO, pembatasan minyak goreng curah atau rencana pemotongan lebih lanjut anggaran kementerian/ lembaga negara, harus sesegera mungkin dianulir atau direvisi. Hal ini mengingat dampaknya justru menekan produksi dan lebih meningkatkan harga.

Insentif produksi yang lebih efektif saat ini harus berada pada sektor hulu dari produksi bukan sektor hilir. Switching anggaran dari sektor-sektor yang non-produktif harus dilakukan terutama yang terkait dengan belanja rutin dan perlengkapan, baik di pusat dan di daerah. Peningkatan subsidi untuk memastikan keberhasilan panen serta evaluasi rantai distribusi komoditi pokok harus lebih digencarkan, bila perlu dengan penindakan tegas terhadap distributor nakal.
